

BAB VI

PENUTUP: RINGKASAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN

Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu kehidupan sosial-ekonomis masyarakat pedesaan adalah dengan membuka berbagai lembaga kredit di daerah pedesaan. Di samping diharapkan bisa menjadi lembaga tandingan untuk mengeliminasi peranan para pelepas uang atau pengijon yang acapkali memberi pinjaman dengan bunga yang mencekik leher. Kehadiran lembaga kredit pedesaan yang dikelola pemerintah diharapkan juga bisa menjadi salah satu alternatif sumber dana untuk menunjang pengembangan investasi masyarakat pedesaan.

Pertanyaannya sekarang, apakah misi sosial yang dibebankan kepada lembaga kredit pedesaan itu telah terwujud? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini sudah tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan satu penelitian cermat tersendiri dan ada banyak faktor yang perlu dikaji agar bisa diperoleh jawaban yang bisa diandalkan.

Penelitian sebagaimana dilaporkan adalah salah satu upaya untuk memberikan jawaban. Meskipun mungkin masih jauh dari memadai, tetapi sekurang-kurangnya hasil

penelitian bisa menjadi dasar pijakan untuk mengadakan kajian-kajian lebih lanjut yang lebih serius dan berskala luas.

Secara terinci, beberapa masalah yang dicoba dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Sejauh mana tingkat kerentanan masyarakat desa dan faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat desa meminjam uang ke lembaga kredit pedesaan baik formal maupun informal?; (2) Bagaimana penilaian masyarakat desa terhadap kelebihan dan kekurangan lembaga kredit pedesaan, baik formal maupun informal? (3) Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diperoleh masyarakat desa?; (4) Sejauh mana peranan lembaga kredit pedesaan dalam menunjang pengembangan investasi masyarakat desa?; dan (5) Bagaimanakah pola menabung dari masyarakat desa?

1. Beberapa Temuan Pokok

Dari hasil wawancara terhadap 200 warga pedesaan di kabupaten Trenggalek dan Bojonegoro, beberapa temuan pokok dari hasil penelitian ini adalah:

Pertama, secara ekonomis masyarakat pedesaan tergolong rentan. Hal ini bukan saja terlihat dari tingkat penghasilan mereka yang tergolong kecil (rata-rata per bulan kurang dari Rp. 75.000). Tetapi, juga terlihat dari faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pedesaan berutang.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa seringkali masyarakat pedesaan terpaksa berutang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ada kecenderungan, semakin rendah status ekonomi masyarakat desa, semakin cenderung mereka masuk pada perangkap atau lilitan utang hanya karena untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya primer dan tidak menghasilkan uang, seperti untuk menutupi panen gagal, hajat atau karena ada salah satu anggota keluarga yang sakit.

Kedua, jika dilihat kembali salah satu misi kehadiran lembar kredit formal yang dikelola pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari pengaruh rentenir, maka hasil penelitian ini menemukan beberapa hal yang agak kurang menggembirakan. Dalam penelitian, sebanyak 74 persen responden menyatakan lebih menyukai meminjam ke lembaga kredit informal. Sisanya, 13 persen menyatakan lebih menyukai meminjam ke lembaga kredit formal yang dikelola pemerintah, dan 13 persen yang lain menyatakan sama saja.

Benar, bahwa dalam hal kecepatan pelayanan, keamanan barang jaminan, dan masalah suku bunga, mutu pelayanan lembaga kredit formal relatif lebih unggul daripada lembaga kredit informal. Tetapi, untuk hal-hal seperti prosedur pengurusan, fleksibilitas pembayaran angsuran, besar dan cara penentuan nilai taksir barang keberadaan lembaga kredit informal dinilai warga pedesaan masih

lebih unggul.

Soal nilai taksir perlu kita garis-bawahi. Menurut responden, cara petugas lembaga kredit formal dalam menilai harga barang yang digadaikan atau dijaminkan seringkali dirasa membuat mereka teralienasi dari barang miliknya sendiri. Hal ini berbeda dengan pengalaman mereka yang bisa melakukan tawar-menawar jika berhubungan dengan lembaga kredit informal.

Ketiga, berkait dengan pola pemanfaatan kredit, dalam penelitian ini ditemukan ada dua jenis pemanfaatan yang satu sama lain saling bertolak-belakang. Yang pertama, adalah kredit dinamis atau kredit produktif, yaitu kredit yang pemanfaatannya secara sengaja ditujukan untuk meningkatkan usaha dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan krediturnya. Sedangkan yang kedua adalah kredit statis atau kredit konsumtif, yaitu jenis kredit yang tujuan penggunaanya tidak ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi pemakainya, tetapi lebih dimaksudkan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari.

Masyarakat pedesaan yang cenderung memanfaatkan kredit yang diperoleh untuk kegiatan produktif adalah kelompok masyarakat menengah ke atas, yang tidak saja mapan secara ekonomis, tetapi dari segi tingkat pendidikan juga relatif memadai. Sementara itu, untuk golongan masyarakat miskin yang sesungguhnya menjadi

sasaran utama program lembaga kredit pedesaan yang dikelola pemerintah -- akibat kerentanan yang diderita -- seringkali memanfaatkan kredit yang diperoleh hanya untuk berbagai kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan tidak menghasilkan uang.

Keempat, sejauh ini kehadiran lembaga kredit pedesaan -- untuk sebagian -- memang diperlukan untuk menunjang pengembangan investasi masyarakat pedesaan. Bagi warga masyarakat golongan menengah ke atas, kredit yang diperoleh seringkali hanya berfungsi sebagai modal tambahan belaka. Sementara itu, bagi warga masyarakat miskin, kredit yang diperoleh dari lembaga kredit acapkali berfungsi sebagai modal utama.

Penting dicatat bahwa meskipun bagi golongan masyarakat miskin kredit yang diperoleh dari lembaga kredit pedesaan berfungsi sebagai modal utama usaha. Namun, itu semua bukan berarti kredit tersebut otomatis juga bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat tersebut. Sejauh ini, keberadaan kredit bagi golongan masyarakat miskin di pedesaan hanya berfungsi untuk mencegah proses pemiskinan massa yang lebih parah, dan tidak berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Kelima, ada tiga pola menabung yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni: menabung tradisional tidak produktif, menabung tradisional produktif, dan menabung

modern produktif.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat miskin cenderung pola menabungnya adalah tradisional tidak produktif, yakni menyimpan begitu saja dalam bentuk uang yang tidak berbunga dan tidak bisa naik nilai ekonomisnya. Hal ini berbeda dengan golongan masyarakat menengah ke atas desa yang seringkali menyimpan uang (baca: menabung) dalam bentuk dibelikan perhiasan atau disimpan di dalam berbagai bank atau lembaga keuangan lain yang otomatis menghasilkan tambahan pendapatan tersendiri.

2. Implikasi Hasil Penelitian

Pertanyaan kita sekarang, apa makna berbagai pokok temuan sebagaimana sudah diutarakan terhadap kebijakan dan strategi makro pembangunan? Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sekecil apapun hasil temuan penelitian ini, tetapi sesungguhnya ia tetap memiliki makna yang berguna untuk direnungkan dan bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai strategi pembangunan yang selama ini kita lakukan.

Diakui atau tidak, selama ini ada kecenderungan berbagai paket program yang disusun dan ditujukan kepada kelompok masyarakat desa senantiasa dicoba netral dan di permukaan seolah-olah terkesan egaliter. Introduksi paket-paket kredit, misalnya, yang dilakukan secara

terbuka di mana semua orang bisa memanfaatkan secara sepintas memang terkesan adil dan berpihak kepada pemerataan kesempatan.

Tetapi, apakah benar strategi pembangunan semacam itu betul-betul bisa menjamin keadilan dan pemerataan bagi masyarakat desa? Untuk masyarakat yang basis sosial antar warganya relatif homogen dan kesenjangan sosialnya tidak menyolok, mungkin memang benar bahwa strategi pembangunan yang mengutamakan pemerataan kesempatan akan bisa merangsang tumbuhnya sikap-sikap inovatif dan memupuk etik wirausaha.

Tetapi, tentu lain soal jika masyarakat yang tengah dicoba dibangun adalah suatu komunitas yang sangat pluralistik dan justru terdapat polarisasi sosial yang cukup menyolok. Pada masyarakat semacam ini, bukan tidak mungkin paket-paket pembangunan yang disusun secara terbuka dan egaliter justru akan menyebabkan sebagian besar anggota masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah akan semakin *collaps* dan selalu kalah dalam berebut berbagai kesempatan.

Persoalan bukan terletak pada soal apakah secara kultural mental warga masyarakat kelompok itu memang malas atau karena sikapnya yang tidak inovatif. Tetapi, persoalannya di sini adalah karena adanya kendala struktural. Sudah barang tentu warga masyarakat yang secara ekonomis lebih mapan dan dari segi tingkat

pendidikan lebih memadai secara sosiologis akan lebih cekatan dalam memanfaatkan berbagai kesempatan. Sementara itu, untuk warga masyarakat yang secara ekonomis rentan dan kurang berpendidikan tentu cuma bisa gigit jari karena ia besar kemungkinan akan minim kemampuan. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa warga masyarakat yang berasal dari lapisan bawah sering mereka jarang memiliki koneksi atau *patron* yang bisa diandalkan untuk mencari alternatif tempat bergantung.

Apa yang telah diutarakan setidak-tidaknya bisa menyadarkan kita bahwa usaha untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat miskin di desa bukanlah masalah yang mudah. Ada hal-hal mendasar yang harus dipikirkan dan diperhitungkan sebelum kita menyusun berbagai kebijakan yang hendak ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin di desa tersebut. Hasil penelitian ini hanya sekedar menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat miskin tampaknya mau tidak mau harus dilakukan dengan cara memihak dan efektif.

Jangan sampai terjadi, hanya karena ingin meniru strategi pembangunan negara maju yang terlalu menekankan persaingan bebas, lalu rakyat miskin terpaksa harus menjadi korban karena mereka tidak bisa mengikuti laju arus pembangunan yang terlalu berkiblat pada prinsip-prinsip efisiensi dan pertumbuhan. Semoga.